



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

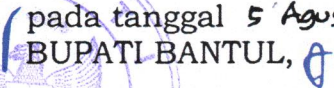
BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
BUPATI BANTUL, 

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
KABUPATEN BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

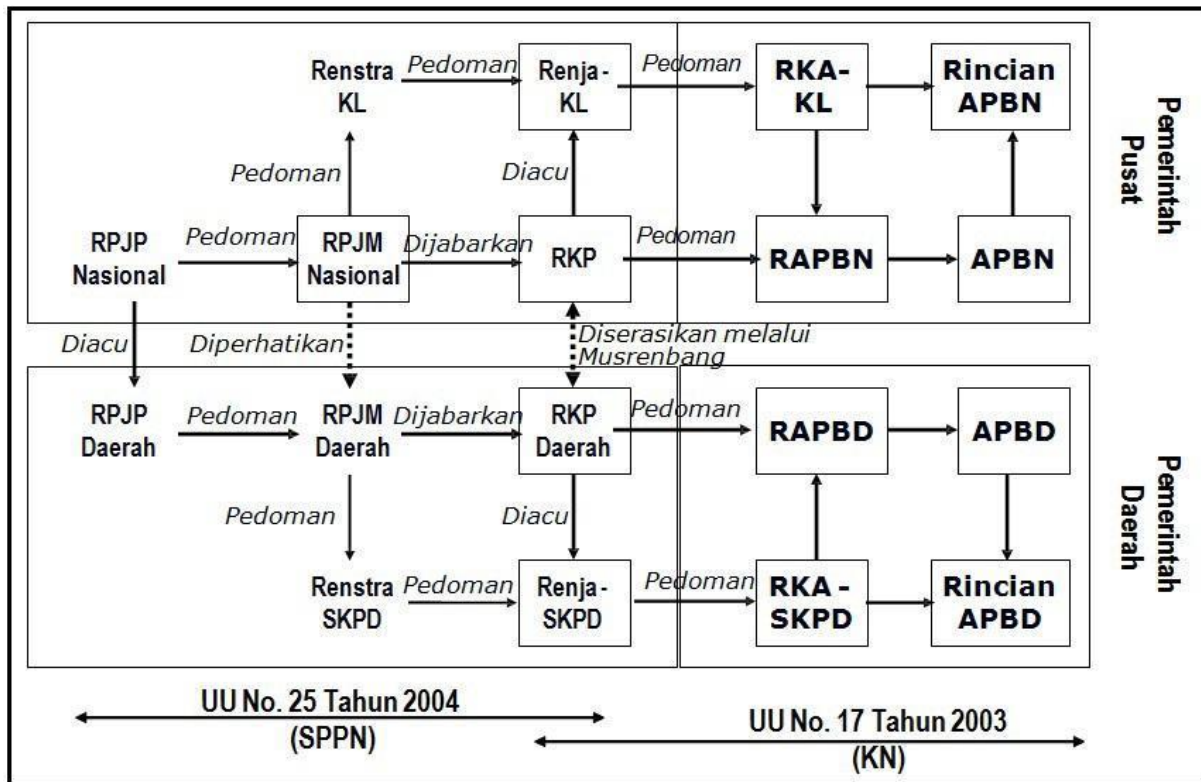
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V.	PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023,
2. evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.18	PENANAMAN MODAL									
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai AKIP	85	85,02	85	97,74	115%	85	87	102%
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
2.18.01.2.01.06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan barang/aset	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Laporan capaian kinerja	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Laporan kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Laporan keuangan	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2 18 01 2.01 07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2.18. 01.2. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18. 01.2. 02.0 1	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 kali	14 kali	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	100%	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	100%
2.18. 01.2. 02.0 2	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.18. 01.2. 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18. 01.2. 05.1 1	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	60 orang	60 orang	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.06.01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	12 jenis	12 jenis	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 paket	1 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
2.18.01.2.06.02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera	10 buah	10 buah	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis	20 jenis	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	19 paket	19 Paket	100%	2 paket	2 paket	100%
2.18.01.2.06.03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis	10 jenis	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	25 paket	25 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
2.18.01.2.06.05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	14 jenis	14 jenis	-	-	-	-	-	-
		Penggandaan	93766 lembar	93766 lembar	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	9 paket	9 paket	20 paket	20 paket	100%	5 paket	5 paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		yang Disediakan								
2.18.01.2.06.06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	6 jenis	6 jenis	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
2 18 01 2.06 08	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.18.01.2.06.09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	18 dokumen	18 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Penerimaan tamu	240 orang	240 orang	-	-	-	-	-	-
		Perjalanan dinas dalam daerah	557 OP	557 OP	-	-	-	-	-	-
		Perjalanan dinas luar daerah	25 OP	24 OP	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2 18 01 2.06 10	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
2 18 01 2.06 11	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Materai dan benda pos	219 lembar	219 lembar	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.18.01.2.08.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.18.01.2.08.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan internet	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.18.01.2.08.03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	57 jenis	57 jenis	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.18.01.2.08.04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Laporan keamanan kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Laporan kebersihan kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Pengelola keuangan dan BMD	120 orang bulan	120 orang bulan	-	-	-	-	-	-
		Tim penyedia barang dan jasa	3 orang	3 orang	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.09.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda dua	7 unit	7 unit	-	-	-	-	-	-
		Kendaraan dinas roda empat	7 unit	7 unit	-	-	-	-	-	-
		Pajak kendaraan dinas roda dua	7 unit	7 unit	-	-	-	-	-	-
		Pajak kendaraan dinas roda empat	7 unit	7 unit	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	100%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	198 unit	198 unit	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 unit	122 unit	122 unit	122 unit	100%	122 unit	122 unit	100%
2.18.01.2.09.09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
		Rehabilitasi gedung kantor	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		yang Dipelihara/Direhabilitasi								
2.18.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.13.04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen mutu	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Laporan pelaksanaan pendampingan	10 dokumen	10 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Sertifikasi ISO 9001:2015	1 sertifikat	1 sertifikat	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.02.2.01.001	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Peraturan Bupati	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
		SOP pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Kemudahan Penanaman Modal	Kemudahan Penanaman Modal								
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.02.2.01.02	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Kegiatan Usaha	-	-	4 Kegiatan Usaha	1918 Kegiatan Usaha	100%<*)	-	-	-
2.18.02.2.01.003	Subkegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	-	-	-	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	1 peta	1 peta	1 peta	1 peta	100%	1 peta	1 peta	100%
2.18.02.2.02.001	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Review Rencana Umum Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.18.02.2.02.0004	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan peluang usaha	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkataninvestasi di Kabupaten/ Kota	8,30%	28,49%	11,29%	31,33%	277,50%	12,79%	24,20%	291,56%
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.03.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan strategi Promosi	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
2.18.03.2.01.02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Kegiatan pameran penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal**)	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan Pelayanan Perizinan dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	3000 legalitas	3654 legalitas	3000 legalitas	4065 legalitas	135,5%	3000 legalitas	3573 legalitas	119,1%
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	4 kegiatan usaha	1918 kegiatan usaha*)	47950% **)	4 kegiatan usaha	642 kegiatan usaha	16050%
2.18.04.2.01.0006	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin terbit	3000 izin	3744 izin		-	-	-	-	-
		Standar Pelayanan	1 dokumen	1 dokumen		-	-	-	-	-
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	1600 pelaku usaha	2732 pelaku usaha	170,75%	1700 pelaku usaha	4908 pelaku usaha	327%
2.18.04.2.01.0007	Subkegiatan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Laporan pelaksanaan sosialisasi perizinan	7 dokumen	7 dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-	-	750 orang	2103 orang	280,4%	800 orang	1705 orang	243,5%
2.18.04.2.01.0008	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Laporan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	-	1900 kegiatan usaha	2732 kegiatan usaha	143,7%	2000 kegiatan usaha	2210 kegiatan usaha	122,7%
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	10 perusahaan	55 perusahaan	8 perusahaan	12 perusahaan	150%	8 perusahaan	38 perusahaan	380%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.18.05.2.01.01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	116 dokumen LKPM	119 dokumen LKPM	-	-	-	-	-	-
2.18.05.2.01.004	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	118 Kegiatan usaha	140 Kegiatan usaha	118,6%	120 Kegiatan usaha	126 Kegiatan usaha	108%
2.18.05.2.01.02	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	232 Perusahaan PMA dan PMDN	232 Perusahaan PMA dan PMDN	-	-	-	-	-	-
2.18.05.2.01.005	Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanama Modal	-	-	234 pelaku usaha	380 pelaku usaha	162,3%	236 pelaku usaha	283 pelaku usaha	121,9%
2.18.05.2.01.006	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan	22 Perusahaan PMA dan PMDN	55 Perusahaan PMA dan PMDN	-	-	-	-	-	-
2.18.05.2.01.03	Subkegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi	-	-	24 kegiatan usaha	49 kegiatan usaha	204,1%	26 kegiatan usaha	43 kegiatan usaha	195,4%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha								
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Aplikasi Sim dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/ kota	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
2.18.06.2.01.01	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemeliharaan aplikasi dan database	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-
		Upgrade aplikasi perizinan dan non perizinan	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-
2.18.06.2.01.01	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tingkat penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA di Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Subkegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Legalitas usaha bagi UMKM atau terbitnya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	-	560 legalitas	330 legalitas**)	58,9%	720 pelaku usaha	720 usaha pelaku	100%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penyusunan ROPK Keuangan terkendala perubahan kebijakan SHBJ pelaksanaan DAIS
	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penyusunan ROPK Keuangan terkendala perubahan kebijakan SHBJ pelaksanaan DAIS
	Subkegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Hasil implementasi di lapangan tidak sesuai target karena terkendala teknis pada aplikasi <i>oss.go.id</i>

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Upaya konsisten melaksanakan program sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Upaya konsisten melaksanakan kegiatan sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Upaya penyusunan dokumen perencanaan sesuai NSPK
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Kerjasama yang intens baik internal maupun eksternal

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Upaya konsisten melaksanakan kegiatan sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan dengan stakeholder terkait
	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Koordinasi internal yang baik serta komunikasi yang lancar dengan stakeholder terkait
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Upaya konsisten melaksanakan kegiatan sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Upaya konsisten melaksanakan kegiatan sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Kegiatan Penataan Organisasi	Upaya konsisten melaksanakan kegiatan sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan
	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Partisipasi aktif tim manajemen mutu ISO 9001:2015
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Partisipasi aktif pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i> terkait
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
3	Program Promosi Penanaman Modal	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Upaya konsisten melaksanakan kegiatan sesuai ROPK baik fisik maupun keuangan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Promosi yang cukup memadai
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Komitmen berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Inovasi dalam penyelenggaraan tupoksi (Gampil/Gerakan Melayani Perizinan Langsung)
	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terbentuknya Tim Manajemen Komplain yang efektif
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi internal yang baik dalam mengimplementasikan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan
5	Program Pengendalian Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan OPD terkait
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan OPD terkait
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Inovasi dalam penyelenggaraan tupoksi (Geplak/Gerakan Pendampingan Penyusunan LKPM)
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Database, sarana dan prasarana yang memadai serta kerjasama tim personil yang baik
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terbentuknya Tim Pengawasan yang efektif
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	Koordinasi tim yang baik dan pihak ketiga yang mempunyai

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kemampuan yang baik dibidangnya
	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Koordinasi tim yang baik dan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan yang baik dibidangnya

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara intensif terkait permasalahan teknis penerapan aplikasi maupun kaitannya dengan Standar Perizinan Berusaha yang mencakup norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha pada masing-masing sektor;
2. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penyelenggara pelayanan perizinan;
3. Menyelenggarakan sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat, perlunya terus menjaga komunikasi dan koordinasi kepada masyarakat agar dapat memahami apa yang sebenarnya diharapkan dalam pelayanan;
4. Merumuskan strategi pelayanan perizinan dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Artinya bahwa hal-hal yang diupayakan dalam peningkatan pelayanan harus benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat;
5. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung pelayanan publik serta melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota untuk mendukung iklim investasi yang kondusif;;

- 7. Menggalakkan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul;
- 8. Mengoptimalkan pengendalian (pengawasan, pembinaan dan pemantauan) pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- 9. Mengoptimalkan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendukung iklim investasi yang kondusif;
- 10. Menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan PTSP.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Nilai Realisasi Investasi	2.193.856.422.696,05	2.030.544.921.489,56	2.881.147.742.696,05	2.290.349.862.696,81	2.640.655.172.836,67	3.110.555.493.366,36	Mengalami kenaikan signifikan karena didukung adanya inovasi Gerakan Pendampingan Penyusunan LKPM serta upaya Fasilitasi permasalahan Pelaku Usaha dalam merealisasikan pelaksanaan penanaman modal
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	85,5	88,84	85,75	86	86,25	Hasil survei melampaui target

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
								karena adanya upaya inovasi Gerakan Melayani Perizinan Langsung dan Upaya konsisten untuk selalu mereviu Standar Pelayanan dan SOP dalam penyelenggaraan pelayanan

Sesuai pencapaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak terdapat IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Nilai Realisasi Investasi
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- ✓ Sosialisasi tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA);
- ✓ Bimbingan Teknis/Pendampingan Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- ✓ Koordinasi Intensif dengan Kementerian Pusat maupun Instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya, serta *stakeholder* terkait dan para pelaku usaha;
- ✓ Penyiapan / pengadaan bahan promosi investasi yang inovatif;
- ✓ Optimalisasi pemanfaatan akses semua media sosial.
- ✓ Sinkronisasi aturan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan PTSP;
- ✓ Membuat kebijakan dan sistem pendukung agar pelayanan tetap berjalan dengan baik;
- ✓ Menggabungkan NSPK lama dan baru sambil menunggu sinkronisasi regulasi;
- ✓ Disosialisasikannya terus menerus tentang komitmen Mal Pelayanan Publik/MPP;
- ✓ Pembahasan secara komprehensif terhadap Standar Pelayanan dan SOP;

- ✓ Penyelenggaraan *in-house training* dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM secara konsisten ;
- ✓ Tim bidang IT yang berkoordinasi secara intensif dalam memperbaiki kendala sistem aplikasi yang ada;
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara bertahap dan berkelanjutan;
- ✓ Upaya Inovasi dalam penyelenggaraan tupoksi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh semua *stakeholder*.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pelaksanaan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah;
3. Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
4. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota;
5. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
6. Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten;
7. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
9. Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
10. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
11. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten;
12. Penyelenggaraan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten;
13. Pelaksanaan rangkaian inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Kekuatan	Kelemahan
Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai sesuai kebutuhan
Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Komitmen dan sinergitas OPD yang tergabung dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu belum optimal
Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul	Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan untuk optimalisasi penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah	Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan kebijakan;
Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi	Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kualitas pelayanan birokrasi;
Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP	Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Upaya/ Strategi sebagai langkah ke depannya untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi, antara lain:
 - 1 Menyusun strategi kegiatan promosi dan pengembangan investasi untuk tahun anggaran berikutnya;
 - 2 Melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan-kegiatan investasi sektoral dengan berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait seperti pengembangan

investasi di sektor industri kreatif, pariwisata, pertanian (tanaman hidroponik, atau penggunaan bibit unggul), dan sebagainya;

- 3 Melaksanakan pengawasan lebih intensif bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku;
- 4 Memfasilitasi penyusunan Kebijakan Daerah (Peraturan Bupati) mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 5 Melaksanakan upaya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- 6 Melaksanakan upaya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 7 Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 8 Selalu membangun paradigma investasi berbasis lahan menjadi investasi berbasis tata ruang, melalui upaya mengoptimalkan ruang yang tersedia tanpa melanggar ketentuan penggunaan yang berlaku;

Upaya/strategi sebagai langkah kedepannya untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan selalu ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan mengoptimalkan sinergitas antar *stakeholder* dan manfaatnya dapat dirasakan/ berdampak langsung kepada masyarakat;
2. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik melalui diklat/bimtek, *inhouse training*, *sharing session*;
3. Melaksanakan upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;
4. Sinkronisasi pembangunan reformasi birokrasi tematik (penurunan angka kemiskinan, peningkatan investasi, adaptasi dengan iklim digital) melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, efisien, efektif serta tidak berbelit.
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai representasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang semakin berkualitas (penyederhanakan aturan-aturan dalam pengurusan perizinan serta kemudahan dalam berinvestasi);
6. Mengupayakan peningkatan secara terus menerus mutu pelayanan melalui Implementasi Standar Mutu;

7. Perbaikan berkelanjutan sarana dan prasarana /infrastruktur pelayanan publik (Sistem Perizinan *Online* Daerah, lokasi dan tempat layanan serta media publikasi);

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Urusan Pemerintahan wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.1 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				13.126.269.256	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.083.714.293,00	
2.1 8.0 1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	85	11.374.915.256	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	85	6.088.167.527,00	
2.1 8.0 1.2 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	100%	152.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	100%	16.100.000,00	
2.1 8.0 1.2 .01 .01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	118.000.000	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1 8.0 1.2 .01 .06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	17.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.500.000	
2.1 8.0 1.2 .01 .07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	17.000.000	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.600.000	
2.1 8.0 1.2 .02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	4.816.900.128	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	4.920.815.858,00	
2.1 8.0 1.2 .02 .01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.732.800.128	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.852.055.858,00	
2.1 8.0 1.2 .02 .02	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	4 Dokumen	84.100.000	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	4 Dokumen	68.760.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pelaksanaan TugasASN					Pelaksanaan Tugas ASN			
2.1 8.0 1.2 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	475.200.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	13.700.000,00	
2.1 8.0 1.2 .05 .11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	300 Orang	475.200.000	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	60 Orang	13.700.000,00	
2.1 8.0 1.2 .06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	3.058.246.200	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	347.026.402,00	
2.1 8.0 1.2 .06 .01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangn Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	374.385.800	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangn Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.008.710,00	
2.1 8.0 1.2 .06 .02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.000.000.000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediakan	5 Paket	59.902.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1 8.0 1.2 .06 .03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	326.040.000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	39.054.292,00	
2.1 8.0 1.2 .06 .05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	372.711.400	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	42.512.800,00	
2.1 8.0 1.2 .06 .06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Dokumen	7.986.0 00	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Dokumen	6.600.000	
2.1 8.0 1.2 .06 .08	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tam	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.123. 000	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tam	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.245.000,00	
2.1 8.0 1.2 .06 .09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	920.000 .000	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	153.183.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1 8.0 1.2 .06 .10	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	21.000.000	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	6.220.000,00	
2.1 8.0 1.2 .06 .11	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	21.000.000	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	7.300.000	
2.1 8.0 1.2 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	668.603.798	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	262.476.417,00	
2.1 8.0 1.2 .08 .01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.649.900	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.190.000,00	
2.1 8.0 1.2 .08 .02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.930.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.200.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1 8.0 1.2 .08 .03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84.700.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.536.205,00	
2.1 8.0 1.2 .08 .04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	541.323.898	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	199.550.212,00	
2.1 8.0 1.2 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.003.965.130	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	409.413.850,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1 8.0 1.2 .09 .02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	600.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	151.249.350,00	
2.1 8.0 1.2 .09 .06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	500.000.000	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	38.060.000,00	
2.1 8.0 1.2 .09 .09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	903.965.130	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	220.104.500,00	
2.1 8.0 1.2 .13	Kegiatan Penataan Organisasi	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	100%	200.000.000	Kegiatan Penataan Organisasi	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	100%	118.635.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1 8.0 1.2 .13 .04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	200.000.000	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	118.635.000,00	
2.1 8.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100%	282.535.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100%	40.831.750,00	
2.1 8.0 2.2 .01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	1 Dokumen	154.275.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	1 Dokumen	30.631.750,00	
2.1 8.0 2.2 .01 .00 01	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	104.665.000	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	17.091.750,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1 8.0 2.2 .01 .00 03	Subkegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	4 Kegiatan Usaha	49.610.0.000	Subkegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	4 Kegiatan Usaha	13.540.000,00	
2.1 8.0 2.2 .02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	2 Peta Potensi	128.260.000	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	2 Peta Potensi	10.200.000,00	
2.1 8.0 2.2 .02 .00 01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	67.155.000	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.100.000,00	
2.1 8.0 2.2 .02 .00 04	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	61.105.000	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.100.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1 8.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	15,29%	480.003.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	15,29%	208.530.116,00	
2.1 8.0 3.2 .01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100%	406.688 .000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100%	208.530.116,00	
2.1 8.0 3.2 .01 .00 02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	296.688.000	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	202.530.116,00	
2.1 8.0 3.2 .01 .00 03	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	183.315.000	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.000.000,00	
2.1 8.0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	439.351.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	336.918.328,00	
2.1 8.0	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara	DPMPTSP Kab. Bantul	Penerbitan perizinan dan non perizinan	3000 Legalitas	439.351.000	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara	DPMPTSP Kab. Bantul	Penerbitan perizinan dan non perizinan	3000 Legalitas	336.918.328,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.2 .01	Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		penanaman modal			Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		penanaman modal			
2.1 8.0 4.2 .01 .00 05	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPSTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronis asi Penetapan Pemberian Fasilitas/I nsentif Daerah	4 Kegiatan Usaha	33.880. 000	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPSTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan dan Koordinasi Sinkronis asi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	4 Kegiatan Usaha	6.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1 8.0 4.2 .01 .00 06	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Non	1.800 Pelaku Usaha	76.230.000	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Non	1.800 Pelaku Usaha	213.048.080,00	
2.1 8.0 4.2 .01 .00 07	Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Perizinan Non	850 Orang	288.827.000	Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Perizinan Non	850 Orang	24.275.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1 8.0 4.2 .01 .00 08	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2100 Kegiatan Usaha	40.414.000	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2100 Kegiatan Usaha	93.595.248,00	
2.1 8.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	432.337.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	64.780.116,00	
2.1 8.0 5.2 .01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	8 Perusahaan	432.337.000	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	8 Perusahaan	64.780.116,00	
2.1 8.0 5.2 .01 .00 04	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	122 Kegiatan Usaha	142.229 .000	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	122 Kegiatan Usaha	10.625.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kegiatan Usahanya					merealisasikan Kegiatan Usahanya			
2.1 8.0 5.2 .01 .00 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	238 Pelaku Usaha	220.090.500	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	238 Pelaku Usaha	8.800.000,00	
2.1 8.0 5.2 .01 .00 06	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	28 Kegiatan Usaha	70.017.500	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	28 Kegiatan Usaha	45.355.116,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Perizinan Berusaha					Perizinan Berusaha			
2.1 8.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	117.128.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	144.486.456,00	
2.1 8.0 6.2 .01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	2 Jenis Database	117.128.000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	2 Jenis Database	144.486.456,00	
2.1 8.0 6.2 .01 .00 2	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	117.128.000	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	144.486.456,00	
4.0 1.0 4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Bantul			200.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Bantul			200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.0 1.0 4.5 .02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	200.000.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	200.000.000	
4.0 1.0 4.5 .02 .00 01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 inovasi	200.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Koa	1 inovasi	200.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Bahwa dalam upaya merealisasikan sasaran kinerja utama perangkat daerah yakni meningkatnya nilai realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat telah diupayakan secara masif oleh OPD melalui aktivitas program kegiatan maupun subkegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat khususnya pelaku usaha maupun pemohon izin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melalui penyelenggaraan urusan pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan adalah penyediaan kegiatan layanan publik yang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun pemohon izin yang merupakan fasilitasi non fisik. Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pelayanan prima bukan sesuatu hal yang harus diusulkan masyarakat, namun telah menjadi prioritas kegiatan OPD secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kepuasan Masyarakat telah menjadi tolok ukur kinerja OPD sehingga umpan balik masyarakat terhadap perbaikan layanan yang terus menerus menjadi prioritas program kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Penyelenggaraan Forum OPD merupakan forum untuk menjaring umpan balik *stakeholder* dan penyelarasan program kegiatan OPD sebagai upaya untuk perbaikan layanan.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku
Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Bantul, Kabupaten Bantul	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Rp.100.000.000,- / 10 Paket	POKIR

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
- PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
- PN 5: Melanjtkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peningkatan Penataan Organisasi;
8. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
12. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah" dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
2. Pemerataan kualitas infrastruktur
3. Peningkatan SDM berdaya saing
4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana
5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi.
6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasan industri piyungan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
				Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai realisasi Investasi	Rp2.193.856.422.696,05	Rp2.881.147.742.696,05	Rp2.290.349.862.696,81	Rp2.640.655.172.836,67
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,57	88,84	85,75	86

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						7.083.714.293							14.441.117.256		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.883.714.293								14.241.117.256	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6.883.714.293								14.241.117.256	
1	2.18.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-			85 angka	6.088.167.527	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	12.569.604.256	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	-			100 persen	16.100.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	152.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.0 1.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	9.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		118.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.0 1.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	4.500.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		17.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.0 1.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.600.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		17.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \$AKIP	-			100 persen 85 Nilai	4.920.815.858	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul	-	5.098.435.128	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	4.852.055.858	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul		5.014.335.128	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	68.760.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul		84.100.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \$AKIP	-			100 persen 85 unde- fine d	13.700.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul	-	475.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.05 .0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				60 Orang	13.700.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul		475.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	18.245.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		16.672.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
								153.183.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		980.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	6.220.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		23.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.06 .0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7 Dokumen	7.300.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		23.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \$AKIP	-			100 persen 85 Nilai	262.476.417	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	668.603.798	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.190.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		2.190.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.200.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		33.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	41.536.205	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		90.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	199.550.212	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		543.413.798	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \$AKIP	-			100 persen 85 Nilai	409.413.850			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	2.503.965.130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	151.249.350	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		600.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				122 Unit	38.060.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		500.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Ururan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.0 1.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	220.104.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		1.403.965.130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.13	Penataan Organisasi	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \$AKIP	-			85 Nilai	118.635.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 1.2.13 .0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Dokumen	118.635.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.0 2	PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	-			100 Persen	40.831.750	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha	-	236.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insenti f Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	-			1 dokumen	30.631.750	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha	-	128.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 2.2.01 .0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provin si dalam Pemberian Fasilitas/Insen tif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	17.091.750	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha		86.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 2.2.01 .0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				238 Pelaku Usaha	8.800.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha		220.090.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 5.2.01 .0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				28 Kegiatan Usaha	45.355.116	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha		67.917.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2.18.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan.	-			100 Persen	144.486.456	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	117.128.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 62.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/ko ta	-			2 jenis database	144.486.456	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	117.128.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.0 6.2.01 .0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara				2 Dokumen	144.486.456	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		117.128.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB V. PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS,



Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 196902041993032004